DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN KABUPATEN MAMUJU

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA PERANGKAT DAERAH
(LAKIP 2022)

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah merupakan dasar untuk terselenggaranya "*Good Governance*". Adapun dasar-dasar terselenggaranya "*Good Governance*" yaitu Tap MPR RI No. XI/1998 tentang penyelenggaraan Negarayang bersih dan bebas KKN, Undang -Undang No. 28 Tahun 1999 tentang Negara yang bersih dan bebas KKN serta Inpres No. 7 Tahun1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Akuntabilitas adalah kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban kinerja dan tindakan suatu organisasi, sedangkan kinerja itu sendiri merupakan hal mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/ kebijaksanaan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi. Oleh sebab itu maka Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan organisasi.

Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk TeknisPerjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, disebutkan bahwa laporan akuntabilitas kinerja adalah laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggungjawaban kinerja suatu instansi dalammencapai tujuan/sasaran strategis instansi. Laporan akuntabilitas kinerja berisi ikhtisar pencapaian sasaran yang ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja dan dokumen perencanaa

B. MAKSUD DAN TUJUAN

a. Maksud Laporan

1. Memberikan informasi perkembangan pelaksanaan tugas Dinas LIngkungan Hidup dan Kebersihan
2. Memberikan informasi perkembangan realisasi fisik dan keuangan yang dikelola Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan
3. Memberikan informasi kendala dan permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas tiap bulan
4. Menemukan alternatif pemecahan permasalahan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran

b. Tujuan Laporan

1. Sebagai sarana laporan pelaksanaan tugas Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan kepada Bupati
2. Salah satu bahan informasi dalam proses pengambilan kebijakan penyelenggaraan kegiatan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan
3. Sebagai bahan peningkatan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi dalam penyelenggaraan kegiatan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan.

C. Uraian Singkat Organisasi

1. Tugas Pokok Dan Fungsi

Dasar Hukum Pembentukan organisasi Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kab. Mamuju berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mamuju dan Peraturan Bupati Nomor 67 Tahun 2019 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi,

Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Mamuju

Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan berkedudukan sebagai unsur Pelaksana urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten dibidang Ligkungan Hidup dan Kebersihan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati Mamuju melalui Sekretaris Daerah

a. Tugas Pokok

1. Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten di bidang Lingkungan Hidup dan Kebersihan dipimpin oleh kepala dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada bupati melalui sekretaris daerah.
2. Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Mempunyai tugas membantu bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada kabupaten di bidang Lingkungan Hidup dan Kebersihan.

b. Fungsi

1. Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan dalam melaksanakan tugas, menyelenggarakan fungsi:
   a. Perumusan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
   b. Pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
   c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
   d. Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan

e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

2. Struktur Organisasi

(1) Susunan Organisasi Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan terdiri dari:

a. Kepala dinas;

b. Sekretariat, terdiri dari:

1. Sub Bagian Umum, Perencanaan dan Evaluasi;
2. Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian.

c. Bidang Penataan dan Penaatan PPLH, terdiri dari:

1. Pengendalai Dampak Lingkungan Ahli Muda
2. Pengendalai Dampak Lingkungan Ahli Muda
3. Pengawas Lingkungan Ahli Muda

d. Bidang Kebersihan, terdiri dari :

1. Pengawas Lingkungan Ahli Muda
2. Pengendali Lingkunagn Ahli Muda

e. Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup, terdiri dari:

1. Pengawas Lingkungan Ahli Muda
2. Pengendali Lingkunagan Ahli Muda
3. Pengawas Lingkungan Ahli Muda

f. Kelompok Jabatan Fungsional; dan

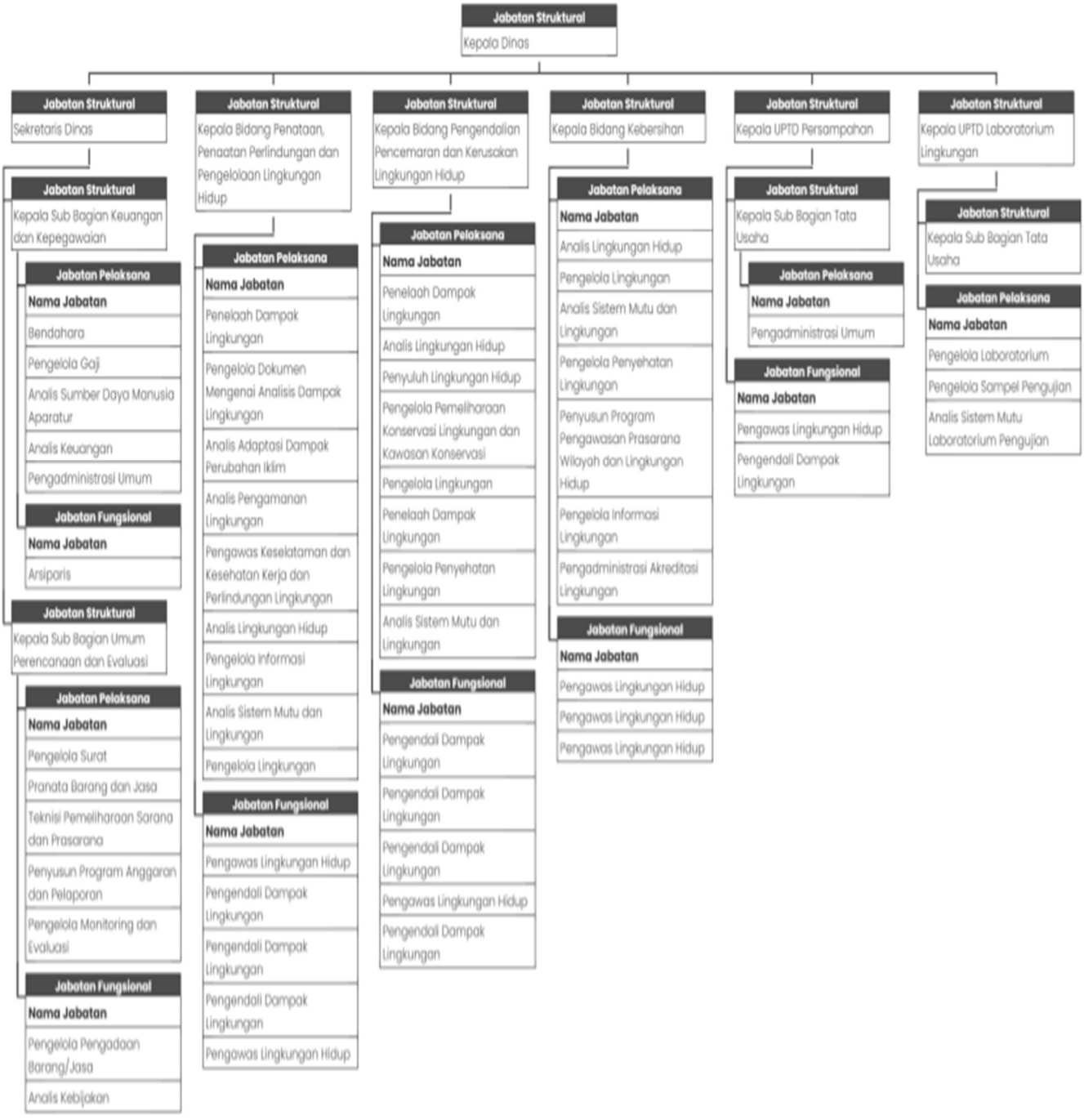
g. Unit Pelaksana Teknis

(2) Sekretariat dan Bidang masing-masing dipimpin oleh seorang sekretaris dan kepala bidang yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala dinas.

(3) Sub bagian dan seksi masing-masing dipimpin oleh kepala sub bagian dan kepala seksi yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada sekretaris dan kepala bidang.

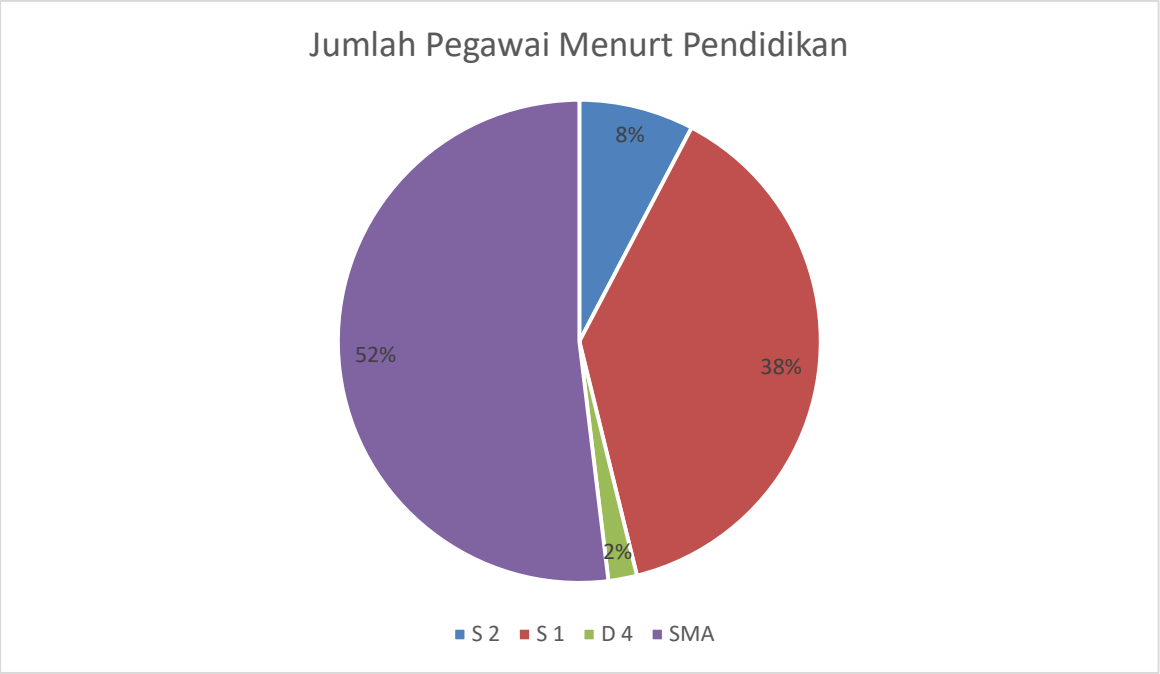
(4) Bagan Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Mamuju sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
KABUPATEN MAMUJU



D. SUMBER DAYA

Untuk mendukung pelaksanaddan tugas pokok dan fungsi, Dinas Perhubungan Kabupaten Mamuju didukung oleh 49 (Empat Puluh Sembilan) Orang pegawai yang secara rinci dapat diuraikan sebagai berikut:



Persentase pada diagram tersebut di atas, diuraikan banyaknya jumlah pegawai pada tabel di bawah ini, yaitu :

PENDIDIKAN	JUMLAH PEGAWAI
S2	6 orang
S1	27 orang
SMA	17 orang
SD	3 orang

- **Kualifikasi Pangkat dan Golongan**

PANGKAT	GOLONGAN	JUMLAH
Pembina Utama Muda	IV/c	1 orang
Pembina Tk. I	IV/b	1 orang
Pembina	IV/a	5 orang
Penata Tk. I	III/d	5 orang
Penata	III/c	5 orang
Penata Muda Tk. I	III/b	3 orang
Penata Muda	III/a	6 orang
Pengatur Tk. I	II/d	6 orang
Pengatur	II/c	4 orang
Pengatur Muda Tk. I	II/b	8 orang
Pengatur	II/a	2 orang
Juru Tk. I	I/d	1 orang
Juru	I/c	1 orang
Juru Muda Tk. I	I/b	1 orang

- **Kualifikasi Pejabat Struktural dan Fungsional**

PEJABAT STRUKTURAL	FUNGSIONAL
6 orang	13 orang

BAB II
PERENCANAAN KINERJA

A. INDIKATOR KINERJA UTAMA

Indikator kinerja merupakan alat atau sarana yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan suatu instansi dalam mencapai tujuan dan sasarannya. Biasanya, indikator kinerja akan memberikan rambu atau sinyal mengenai apakah kegiatan atau sasaran yang diukurnya telah berhasil dilaksanakan atau dicapai sesuai dengan yang direncanakan. Indikator kinerja yang baik akan menghasilkan informasi kinerja yang memberikan indikasi yang lebih baik dan lebih menggambarkan mengenai kinerja organisasi. Selanjutnya apabila didukung dengan suatu sistem pengumpulan dan pengolah data kinerja yang memadai maka kondisi ini akan dapat membimbing dan mengarahkan organisasi pada hasil pengukuran yang handal (*reliable*) mengenai hasil apa saja yang telah diperoleh selama periode aktivitasnya.

Selanjutnya indikator kinerja tidak hanya digunakan pada saat menyusun laporan pertangungjawaban. Indikator kinerja juga merupakan komponen yang sangat krusial pada saat merencanakan kinerja. Berbagai peraturan perundang-undangan sudah mewajibkan instansi pemerintah untuk menentukan indikator kinerja pada saat membuat perencanaan. Dengan adanya indikator kinerja, perencanaan sudah mempersiapkan alat ukur yang akan digunakan untuk menentukan apakah rencana yang ditetapkan telah dapat dicapai. Penetapan indikator kinerja pada saat merencanakan kinerja akan lebih meningkatkan kualitas perencanaan dengan menghindari penetapan-penetapan sasaran yang sulit untuk diukur dan dibuktikan secara objektif keberhasilannya.

A. PERJANJIAN KINERJA

Penyusunan perjanjian kinerja tahun 2022 mengacu pada Renstra Tahun 2016-2021. Secara garis besar perjanjian kinerja tahunan tahun 2022 meliputi 2 sasaran strategis, pengukuran pencapaian sejumlah sasaran tersebut dilakukan melalui 3 indikator kinerja sasaran beserta targetnya. Perjanjian kinerja telah ditetapkan secara berjenjang (cascading) mulai dari eselon II, eselon III dan eselon IV sebagaimana tabel berikut :

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kuliatas Air	60,20
		Indeks Kualitas Udara	89,69
		Indeks Kualitas Lahan	84,26
2	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perencanaan dan pengelolaan keuangan daerah	IKM dan Nilai Standat lainnya	100%
		Predikat SAKIP Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	B
		Nilai Pengelolaan Keuangan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	100%

No	PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 4,391,578,731	APBD
	Program Pengendalian Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Rp. 1,386,067,286	APBD
	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	Rp. 2,514,106,000	APBD
	Program Penegndalian Berbahaya dan Bercun (B3)	Rp. 31,611,560	APBD
	Progaram Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Rp. 28,786,720	APBD
	Program Pengakuan Keberdaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH	Rp. 9,734,280	APBD
	Program Pengelolaan Persampahan	Rp. 6,554,967,800	APBD
	JUMLAH	**Rp. 14,391,852,377**	

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja dalam bentuk Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kabupaten Mamuju tidak terlepas dari rangkaian mekanisme fungsi perencanaan yang dilaksanakan. Dari Perencanaan yang sudah dibuat kemudian dikukuhkan dalam Perjanjian Kinerja selanjutnya setelah tahun anggaran berakhir maka apa yang sudah direncanakan dan diperjanjikan harus diukur dan dilaporkan sebagai bentuk pertanggungjawaban publik.

3.1 Capaian Kinerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Tahun 2022

Dinas Lingkungan Hidup dan kebersihan melaksanakan kewajiban mempertanggung jawabkan amanah tersebut. Penyajian Laporan Kinerja Instansi Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan, Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/618/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing - masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Mamuju 2016-2021. Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan.

Berpedoman pada ketentuan yang berlaku, Kinerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan berdasarkan tingkat pencapaian sasaran, indikator sasaran dan menggambarkan pula tingkat capaian pada program / kegiatan. Untuk mengetahui gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran dan program / kegiatan dilakukan melalui media Rencana Kinerja yang dibandingkan dengan realisasinya. Pencapaian Sasaran diperoleh dengan cara membandingkan target dengan Realisasi Indikator Sasaran melalui media formulir Pengukuran Kinerja. Kemudian atas hasil pengukuran kinerja tersebut dilakukan evaluasi untuk mengetahui keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan.

Untuk mempermudah interprestasi atas pencapaian sasaran dan indikator kinerja sasaran digunakan skala pengukuran ordinal sebagai berikut :

No.	Rentang Capaian	Kategori Capaian
1	Lebih dari 100 %	Baik Sekali (BS)
2	Lebih dari 75 % sd. 100 %	Baik (B)
3	55 % sd. 75 %	Cukup (C)
4	Kurang dari 55 %	Kurang (K)

Secara umum Dinas Lingkungan Hidup dan Keberihan telah dapat melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana (RPJMD) Kabupaten Mamuju Tahun 2016–2021. Dalam RENSTRA terdapat, 1 (Satu) Tujuan dan 2 (Dua) sasaran, dengan 2 (Dua) indikator sasaran.

- Terdapat 1 tujuan, 2 sasaran dan 12 indikator kinerja.

(2 sasaran strategis dan 2 Indikator Kinerja Utama).

Tabel 3.1.1 Pencapaian Indikator Sasaran

NO.		JUMLAH TUJUAN	JUMLAH SASARAN STRATEGIS	JUMLAH INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENCAPAIAN INDIKATOR SASARAN
1		1	1	3	BS = 1 , B = 9 , C = 2 , K = 0
	JUMLAH	*1*	*1*	*3*	BS = 1, B = 9, C = 2, K = 0

Dari 1 (Satu) sasaran dengan 1 (Dua) indikator kinerja, pencapaian indikator sasaran kinerja Pemerintah Kabupaten Mamuju adalah :

Tabel 3.1.2.
Persentase Kategori Pencapaian Indikator Sasaran

No.	Kategori	Jumlah Indikator Sasaran	Persentase
Misi 2 (3 Indikator Sasaran)			
1	Baik Sekali	2	101,89 %
2	Baik	1	99,67 %
3	Cukup		
4	Kurang		
	Jumlah	3	

Hasil analisis pencapaian Pengukuran Kinerja terhadap 1 (Satu) Sasaran Strategis dan 3 (Tiga) Indikator Kinerja Utama, diketahui bahwa 2 indikator atau 101,89 % bermakna Baik Sekali dan 1 Indikator atau 99,67 Bermakna Baik. Rata-rata capaian kinerja pada tahun 2022 sebesar 42.69 %, mengalami penaikan, jika dibandingkan dengan rata-rata capaian kinerja pada tahun 2022 sebesar 101,15 %. Jadi capaian kinerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan pada tahun 2022 bermakna / **berkategori Baik Sekali dan mengalami kenaikan sebesar 63.22 %**.

3.1.1 Membandingkan antara target dan realisasi Kinerja Tahun 2022

Tabel 3.1.1.
Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 1 Meningkatnya Capaian Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

No.	Sasaran Strategis	IKU	Satuan	Tahun 2022		Capaian Kinerja Tahun 2022 (%)	Sumber Data	Ket
				Target	Realisasi			
1	Meningkatnya Capaian Indeks Kualitas Lingkunagan Hidup	Indeks Kualitas Air		60.20	60	99.66	DLHK	
		Indeks Kualitas Udara		89.69	94.14	104.96	DLHK	
		Indeks Kualitas Lahan		84.24	83.25	98.82	DLHK	
						101.15		

Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 1 Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Birokrasi

No.	Sasaran Strategis	IKU	Satuan	Tahun 2022		Capaian Kinerja Tahun 2022 (%)	Sumber Data	Ket
				Target	Realisasi			
2	Meningkatkan Akuntabilitas kinerja Birokrasi	IKM dan Nilai Standat lainnya	Persen	100	100	100	DLHK	
		Predikat LAKIP Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan		B	B	65.75	Inspektorat	
		Nilai Pengelolaan Keuangan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan		100	100	100	DLHK	
						100.00		

Analisis Pencapaian Sasaran 1 Meningkatnya Capaian Indeks Kualitas Air, 2 Meningkatnya Capaian Indeks Kualitas Lahan, 3 Meningktanya Capaian Indeks Kualitas Udara

No.	Sasaran Strategis	IKK	Satuan	Tahun 2022		Capaian Kinerja Tahun 2022 (%)	Sumber Data	Ket
				Target	Realisasi			
1	Meningkatnya Capaian Ideks Kualiatas Air	Persentase Jumlah Sumber Pencemar Berkurang	Persen	50	15	30.00	DLHK	

2	Meningkatnya Capaian Indeks Kulitas Lahan	Persentase Luasan Ruang Terbuka Hijau Tercapai		0.01	11,525	115.00	DLHK	
3	Meningkatnya Indeks Kualitas Udara	Persentase Usagha / Kegiatan Penghasil Limbah B3 yang melakukan Pengelolaan Limbah B3		100	0	0.00	DLHK	
		Persentase Pembinaan dan Pengawasan terkait ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH d yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota		82	0.046	0.06	DLHK	
		Terfasilitasi Pendampingan Pengakuan MHA		100	100	100.00	DLHK	
		Persentase jumlah sampah yang tertangani		74	15.21	20.55	DLHK	
						44.27		

3.1.2 Membandiangkan antara realisasi Kinerja Tahuan 2021 dan 2022

Tabel 3.1.2.
Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 1 Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup Yang Bersih dan Sehat

No.	Sasaran Strategis	IKU	Satuan	Tahun 2021		Capaian Kinerja Tahun 2021 (%)	Tahun 2022		Capaian Kinerja Tahun 2022 (%)	Sumber Data	Ket
				Target	Realisasi		Target	Realisasi			
1	Meningkatnya Capaian Indeks Kualitas Lingkunagan Hidup	Indeks Kualitas Air		60.10	0	0	60.20	60	99.66	DLHK	
		Indeks Kualitas Udara		89.68	102.04	113.782	89.69	94.14	104.96	DLHK	
		Indeks Kualitas Lahan		83.41	0	0	84.24	83.25	98.82	DLHK	
						37.93			101.15		

Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 1 Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Birokrasi

No.	Sasaran Strategis	IKU	Satuan	Tahun 2021		Capaian Kinerja Tahun 2021 (%)	Tahun 2022		Capaian Kinerja Tahun 2022 (%)	Sumber Data	Ket
				Target	Realisasi		Target	Realisasi			
2	Meningkatkan Akuntabilitas kinerja Birokrasi	IKM dan Nilai Standat lainnya	Persen	100	100	100	100	100	100	DLHK	
		Predikat LAKIP Dinas Lingkungan		B	B	63,29	B	B	65.75	Inspektorat	

		Hidup dan Kebersihan									
		Nilai Pengelolaan Keuangan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan		100	100	100	100	100	100	DLHK	
						100.00			100.00		

Analisis Pencapaian Sasaran 1 Meningkatnya Capaian Indeks Kualitas Air, 2 Meningkatnya Capaian Indeks Kualitas Lahan, 3 Meningktanya Capaian Indeks Kualitas Udara

No.	Sasaran Strategis	IKK	Satuan	Tahun 2021		Capaian Kinerja Tahun 2021 (%)	Tahun 2022		Capaian Kinerja Tahun 2022 (%)	Sumber Data	Ket
				Target	Realisasi		Target	Realisasi			
1	Meninkatnya Capaian Indeks Kualitas Air	Persentase penyusunan dokumen perencanaan lingkungan hidup		**100**	**100**	100.00	0	0	0.00	DLHK	
		Persentase Jumlah Sumber Pencemar Berkurang	Persen	0	0	0.00	50	15	30.00	DLHK	
2	Meningkatnya Capaian Indeks Kulitas Lahan	Persentase Luasan Ruang Terbuka Hijau Tercapai		0.01	11,525	115.00	0.01	11,525	115.00	DLHK	

		Persentase Usagha / Kegiatan Penghasil Limbah B3 yang melakukan Pengelolaan Limbah B3		0	0	0	100	0	0.00	DLHK	
3	Meningkatnya Indeks Kualitas Udara	Persentase Pembinaan dan Pengawasan terkait ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH d yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota		0	0	0	82	0.046	0.06	DLHK	
		Terfasilitasi Pendampingan Pengakuan MHA		0	0	0	100	100	100.00	DLHK	
		Persentase jumlah sampah yang tertangani		74	16.48	22.27	74	15.21	20.55	DLHK	
						33.90			37.94		

3.1.3 Membandingkan Realisasi Kinerja Sampai dengan Tahun ini dengan Target Jangka Menengah yang terdapat dalam Dokumen Perencanaan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan

Tabel 3.1.2.
Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 1 Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup Yang Bersih dan Sehat

No.	Sasaran Strategis	Tahun 2021	Tahun 2021	Tahun 2022	Sumber Data	Ket
		Target	Realisasi	Realisasi		
1	Meningkatnya Capaian Indeks Kualitas Lingkunagan Hidup	60.1	0	60	DLHK	
		89.68	102.04	94.14	DLHK	
		83.41	0	83.25	DLHK	

Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 1 Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Birokrasi

No.	Sasaran Strategis	IKU	Satuan	Tahun 2021	Tahun 2022	Sumber Data	Ket
				Realisasi	Realisasi		
2	Meningkatkan Akuntabilitas	IKM dan Nilai Standat lainnya	Persen	100	100		

	kinerja Birokrasi	Predikat LAKIP Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan		B			
		Nilai Pengelolaan Keuangan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan		100	100		

Analisis Pencapaian Sasaran 1 Meningkatnya Capaian Indeks Kualitas Air, 2 Meningkatnya Capaian Indeks Kualitas Lahan, 3 Meningktanya Capaian Indeks Kualitas Udara

No.	Sasaran Strategis	IKK	Satuan	Tahun 2021	Tahun 2022	Sumber Data	Ket
				Realisasi	Realisasi		
1	Meninkatnya Capaian Indeks Kualitas Air	Persentase penyusunan dokumen perencanaan lingkungan hidup		**100**	0	DLHK	
		Persentase Jumlah Sumber Pencemar Berkurang	Persen	0	15	DLHK	
2	Meningkatnya Capaian Indeks Kulitas Lahan	Persentase Luasan Ruang Terbuka Hijau Tercapai		11,525	11,525	DLHK	

		Persentase Usagha / Kegiatan Penghasil Limbah B3 yang melakukan Pengelolaan Limbah B3		0	0	DLHK	
3	Meningkatnya Indeks Kualitas Udara	Persentase Pembinaan dan Pengawasan terkait ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH d yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota		0	0.046	DLHK	
		Terfasilitasi Pendampingan Pengakuan MHA		0	100	DLHK	
		Persentase jumlah sampah yang tertangani		16.48	15.21	DLHK	

3.1.4 Membandingkan Realisasi Kinerja Lingkungan Hidup dan Kberesihan dengan Standar Nasional

(Tidak Aada)

3.1.5 Analisis Penyebab Keberhasilan / Kegagalan atau Peningkatan Penrunan Kinerja serta Alternative yang telah di lakukan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan

1. Indek Kualitas Lingkungan Hidup

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) merupakan gambaran kondisi lingkungan hidup di Kabupaten Mamuju. IKLH dapat digunakan untuk mengevaluasi secara umum kualitas lingkungan hidup dan tren pencapai tujuan pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Mamuju.IKLH difokuskan pada media lingkungan air, udara dan tutupan lahan. Dokumen ini menggambarkan kondisi kualitas air, kualitas udara dan kualitas tutupan lahan pada Kabupaten Mamuju yang pengukurannya dilakukan pada tahun 2022 . Kualitas air diukur pada sungai,kualitas udara diukur pada kawasan-kawasan perumahan, transportasi, industri, dan perkantoran, sedangkan kualitas tutupan lahan dihitung berdasarkan indeks tutupan lahan

a. Indeks Kualitas Air

Pada tahun 2022 Indeks Kualitas Air memiliki (IKA) target 60,20 dan memiliki realisasi dimana relisasinya di Indeks Kualitas Air (IKA) sebesar 60.00 atau capaian sebesar 99,66 %, realisasi ini tidak dapat mencapai

target dikirenakan Kurangnya Jumlah Pemantauan dan Keterbatsan Anggaran, yang dimana Jumlah titik pantau air yaitu 30 yang terdiri 10 sungai dan 3 titik pengujian sampel di setiap sungai sedangkan pada tahun 2021 memiliki target 60.10 dengan realisasi 0 atau Capaian 0 %, untuk di Tahun 2021 Indeks Kualitas Air tidak meliki realisasi dikarenakan adanya Revocusing Anggaran

b. Indeks Kualitas Udara

Pada tahun 2022 Indeks Kualitas Udara (IKU) memiliki Realisasi sebesar 94,14 dan memeiliki target 89,69. Ditahun 2022 Indeks Kualitas Udara memiliki Capaian Kinerja sebesar 108 %, data ini menunjukkan adanya peningkatan nilai Indeks Kualitas Udara (IKU) pada tahun 2022 dan memiliki 5 Titik pemantauan di anata lain yaitu AQM, Industri, Pemukiman, Pemukiman dan Transportasi sedangkan Pada tahun 2021 hasil perhitungan Indeks Kualitas Udara (IKU) sebesar 102,04 dan memeiliki target 89,58 dari data tahun 2021 terdapat adanya penurunan data di tahun 2022 dikarenakan pada saat tahun 2021 tiki pantau Indeks Kualitas Udara (IKU) hanya menggunakan 1 titik pantau yang menggunakan AQM.

c. Indeks Kualitas Lahan

Hutan merupakan salah satu kawasan yang sangat vital baik dari segi ekonomi, sosial dan lingkungan yang dimiliki oleh kabupaten Mamuju. Berdasarkan data, luasan lahan hutan di Kabupaten Mamuju sebesar 359.878,50 ha, atau sekitar 71,17% dari total luasan wilayah kabupaten Mamuju. Luas hutan ini cenderung sama dengan data luasan hutan pada tahun sebelumnya, dimana hal ini dikarenakan data yang

digunakan berdasarkan "tata batas kawasan hutan" yang disahkan oleh pemerintah pusat.

3.1.6 Analisis Atas Efesiensi Penggunaan Sumber Daya Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan

(Tidak Ada)

3.1.7 Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan

i. **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**

a) **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**

- Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
- Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
- Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
- Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
- Koordinasi dan Penyusunan Perubhan DPA-SKPD
- Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

b)Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

- Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
- Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD

c) Administrasi Umum Perangkat Daerah

- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
- Penyediaan Bahan Logistik Kantor
- Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
- Fasilitasi Kunjungan Tamu
- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
-

d) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

- Pengadaan Kendaraan dinas atau Oprasional
- Pengadaan Mebel
- Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

e) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

f) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
- Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

2. **PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN / ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP**

a) Pencegahan Pencemaran dan atau kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten / Kota

- Koordinasi dan Sinskronisasi dan pelaksanaan pencegahan pencemaran Lingkungan Hidup dilaksakan terhadap media Tanah , Air, Udara dan Laut
- Koordinasi dan Sinkronisasi dan pelaksanaan Emisi Gas Rumah Kaca, Mitagasi dan Adaptasi perubahah Iklim

3. **PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)**

a) Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota

- Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)
- Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati diluar Kawasan Hutan

4. **PENGUMPULAN LIMBAH B3 dalam 1 (satu) DAERAH / KABUPATEN**

a) Koordinasi dan sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provensi dalam rangka pengangkutan, pemanfaatan, pengelolaan dan atau penimbunan

- Koordinasi dan sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provensi dalam rangka pengangkutan, pemanfaatan, pengelolaan dan atau penimbunan

5. **PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWSAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLHD)**

a) **Pembinaan dan pengawasan terhadap usaha dan atau kegiatan yang izin lingkungannnya dan Izin PPLH diterbitkan oleh pemerintah daerah kabupaten Kota**

- Pengawasan usaha dan atau kegiatan yang izin LIngkungan Hidup, Izin PPLH yang diterbitkan oleh pemrintah daerah Kabupaten / Kota

6. **PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KERIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH**
   a) **Pengakuan MHA kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan HAk MHA yang terkait dengan PPLH**
      - Koordinasi, Sinkronisasi Penediaan data dan Informasi pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau pengetahuan Tradisonal dan Hak kearifan Lokal atau pengetahuan tradsional dan HAK MHA terkait dengan PPLH
7. **PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN**
   a) Pengelolaan Sampah
      - Pengurangan Sampah dengan melakukan Pembatasan, Pendauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali
      - Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota
      - Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam pengelolaan Persampahan

B. Realisasi Anggaran

NO	KEBIJAKAN/SASARAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET SETELAH PERUBAHAN		RELISASI		SISA ANGGARAN (Rp)
			KINERJA	KEUANGAN	KINERJA	KEUANGAN	
1	**Terselenggaranya Birokrasi yang efektif, efisien. Dan berorientasi pelayanan prima**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**98%**	**4,465,288,743**	**98%**	**4,306,958,621**	**158,330,122**
	Tersedianya dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang berkualitas	***Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah***	**100%**	**37,290,400**	**100%**	**37,287,700**	**2,700**
	Tersedianya Dokumen RKA-SKPD	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	4,060,000	2 Dokumen	4,059,400	600
	Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	8,060,800	1 Dokumen	8,059,800	1,000
	Tersedianya Dokumen DPA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	8,060,800	1 Dokumen	8,060,800	-
	Tersedianya Dokumen Perubahan DPA- SKPD	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	1 Dokumen	1,585,200	1 Dokumen	1,585,150	50
	Tersedianya Dokumen Capaian Kinerja SKPD	*Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD*	1 Dokumen	1,585,200	1 Dokumen	1,584,700	500
	Tersedianya Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah OPD	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Dokumen	13,938,400	4 Dokumen	13,937,850	550
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**96%**	**3,499,423,736**	**96%**	**3,368,852,950**	**130,570,786**
	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	49 Orang	3,355,511,896	49 Orang	3,225,051,150	130,460,746
	Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan OPD	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Bulan	88,671,600	12 Bulan	88,571,000	100,600
	Tersedianya Penyusunan Laporan Keungan	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	3,161,040	1 Laporan	3,153,000	8,040
	Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran OPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	52,079,200	12 Laporan	52,077,800	1,400
	Tersedianya dokumen Pelayanan Administrasi Barang Milik Daerah pada perangkat daerah yang berkualitas	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**100%**	**10,764,000**	**100%**	**10,760,000**	**4,000**
	Terlaksananya Pengamanan Milik Derah	Pengamanan Barang Milik Daerah	1 Laporan	10,764,000	1 Laporan	10,760,000	4,000
	Terwujudnya Pelayanan Administrasi umum Perangkat Daerah yang berkualitas	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**100%**	**602,009,407**	**100%**	**600,421,456**	**1,587,951**
	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5 Jenis	2,295,000	5 Jenis	2,245,000	50,000

	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	42 Jenis	57,784,531	42 Jenis	57,263,000	521,531
	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	32 Jenis	51,776,876	32 Jenis	51,776,000	876
	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	3 Jenis	19,080,000	3 Jenis	19,075,400	4,600
	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Fasilitasi Kunjungan Tamu	180 Orang	18,550,000	180 Orang	18,517,500	32,500
	Terselenggaranya Rapat Koordinasi dan Konsultasi OPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 Laporan	452,523,000	2 Laporan	451,544,556	978,444
	Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**100%**	**55,682,200**	**100%**	**55,682,200**	-
	Tersedianya mebel	Pengadaan Mebel	4 Buah	11,704,600	4 Buah	11,704,600	-
	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainny	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	6 Unit	43,977,600	6 Unit	43,977,600	-
	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	***Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***	**100%**	**131,727,000**	**100%**	**108,548,829**	**22,186,514**
	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	4 Jenis	62,127,000	4 Jenis	58,148,829	3,978,171
	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	10 Orang	69,600,000	10 Orang	50,400,000	19,200,000
	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	***Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah***	**100%**	**128,392,000**	**100%**	**125,405,486**	**2,986,514**
	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	10 Unit	77,650,000	10 Unit	74,665,486	2,984,514
	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pemeliharaaan Peralatan dan Mesin Lainnya	15 Unit	20,500,000	15 Unit	20,500,000	-
	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1 Unit	30,242,000	1 Unit	30,240,000	2,000
3	**Meningkatnya Pengelolaan Kualitas Air**	**PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP**	**15%**	**1,386,057,286**	**15%**	**1,338,502,236**	**47,555,050**
	Terlaksananya pemantauan kualitas lingkungan hidup	**Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota**	**3 Sempel**	**1,386,057,286**	**3 Sempel**	**1,338,502,236**	**47,555,050**
	Tersusunnya Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	2 Sampel	1,359,551,036	2 Sampel	1,312,176,436	47,374,600
	Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	2 Kecamatan	26,506,250	2 Kecamatan	26,325,800	180,450
4	**Meningkatnya Pengelolaan Kualitas Tutupan Lahan**	**PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)**	**11.53%**		**11.53%**		-

	Terlaksananya Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	***PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)***	**1 Dokumen**	**2,710,106,000**	**1 Dokumen**	**2,702,849,967**	**7,256,033**
	Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan yang Dikelola	Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan	3 Hektar	1,641,100,000	3 Hektar	1,634,098,000	7,002,000
	Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang Dikelola	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	16 Lokasi	1,069,006,000	16 Lokasi	1,068,751,967	254,033
5	**Meningkatnya Pengelolaan Kualitas Udara**	**PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)**	**100%**	**31,611,560**	**0%**	**31,513,030**	**98,530**
	Tersedianya Penyimpanan Sementara Limbah B3	***Pengumpulan Libah B3 dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota***	**1 Dokumen**	**31,611,560**	**1 Dokumen**	**31,513,030**	**98,530**
	Terfasilitasinya Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan sementara Limbah B3 Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan sementara Limbah B3 Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	10 Usaha	31,611,560	10 Usaha	31,513,030	98,530
6	**Meningkatnya Pengelolaan Kualitas Udara**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)**	**0.046%**	**28,786,720**	**0.046%**	**27,778,950**	**1,007,770**
	Terlaksanaan Pembinaan dan Pengawasan terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	***Pembinaan dan Pengawasan terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota***	**39 Usaha**	**28,786,720**	**39 Usaha**	**27,778,950**	**1,007,770**
	Meningkatnya Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan, Persetujuan Lingkungan, Surat Kelayakan Operasi Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	39 Usaha	28,786,720	39 Usaha	27,778,950	1,007,770
7	**Meningkatnya Pengelolaan Kualitas Udara**	**PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH**	**100%**	**9,734,280**	**100%**	**9,729,950**	**4,330**
	Terverivikasinya Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	***Pengakuan MHA, Kearifan Loka, Pengetahuan Tradisiona, dan Hak MHAyang terkait dengan PPLH***	**11 Desa**	**9,734,280**	**11 Desa**	**9,729,950**	**4,330**

	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan Sanksi Administrasi, Penyelesaian Sengketa, dan/atau Penyidikan Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan atau Melalui Pengadilan	Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data, dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH	11 Desa	9,734,280	11 Desa	9,729,950	4,330
8	**Meningkatnya Pengelolaan Kualitas Udara**	**PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN**	**15,21%**	**7,509,122,800**	**15,21%**	**7,306,917,100**	202,205,700
	Terlaksanya Pengelolaan Sampah	***Pengelolaan Sampah***	**45,786 Ton**	**7,509,122,800**	**45,786 Ton**	**7,306,917,100**	**202,205,700**
	Telaksananya Pengurangan Sampah dengan Melakukan Pembatasan, Pendauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali	Pengurangan Sampah dengan Melakukan Pembatasan, Pendauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali	260 Orang	3,976,600,000	260 Orang	3,976,600,000	-
	Terlaksananya Penanganan Sampah dengan Melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Penanganan Sampah dengan Melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	60 Unit	3,332,522,800	60 Unit	3,330,317,100	2,205,700
	Meningkatnya Pemahaman, Kesadaran, Kepedulian, dan Peran Aktif Masyarakat dan Para Pihak Lainnya dalam Pengelolaan Sampah	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	1 Kgiatan	200,000,000	1 Kgiatan		200,000,000

BAB IV
PENUTUP

Sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, LAKIP ini diharapkan dapat berperan selain sebagai alat kendali, tetapi juga dapat digunakan sebagai alat penilai kualitas kinerja, serta sebagai alat pendorong demi terwujudnya pemerintah yang bersih dan berwibawa (*good governance).*

Dalam rangka penyampaian pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi selama tahun 2022, Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Mamuju menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2021 sebagai cerminan dari hasil kinerja Dinas Lingkungan Hidup dan kebersihan selama satu tahun, yang diukur melalui pencapaian target kinerja yang ditetapkan dalam dokumen perjanjian kinerja. Pengukuran kinerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Mamuju tahun 2022, mencakup penilaian tingkat pencapaian target indikator kinerja sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja.

Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan sebagai lembaga teknis daerah yang mempunyai bidang Lingkungan Hidup diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pencapaian sasaran dalam prioritas pembangunan Kabupaten Mamuju. Akhir kata semoga Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan

Kabupaten Mamuju Tahun 2022 ini dapat menjadi salah satu dokumen yang bermanfaat, baik untuk penyusunan perencanaan program, pengambilan keputusan, penetapan kebijakan dan melakukan perbaikan dokumen Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan untuk tahun berikutnya.

Mamuju, 31 Janjuari 2023
Kepala Dinas Lingkungan
Dan Kebersihan,

HAMDHAN MALIK, S.STP
Pangkat : Pembina Utama Muda/ IV-c
NIP : 19750927199511 1 003